

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Menurut Neumen dalam Sugiyono (2017:52), “Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena”. Beberapa teori yang akan menjadi landasan teori dalam penelitian adalah:

2.1.1 Teori *Stewardship*

Grand theory adalah sebuah istilah yang ditemukan oleh Charles, pada penelitian ini *Grand theory* yang digunakan adalah *Stewardship Theory*, teori *stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Davis, 1999:49). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat (publik). Teori *stewardship* sangat bisa diterapkan dalam model kasus organisasi sektor publik karena dalam teori tersebut mengamsumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini yaitu *stewards* dalam hal ini adalah para Pengguna Barang . Pengguna Barang diharakan untuk bekerja dengan mengedepankan tanggung jawab agar kepentingan *principal* yaitu masyarakat dan instansi tersebut berjalan dengan baik. Tujuan dalam peningkatan pengelolaan barang barang tersebut, apabila tercapai olrh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Pelaksanaan tujuan dan tanggung jawab dari tugas tersebut, pemerintah selaku *steward* diharapkan agar mengerahkan semua kemampuan dan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan sistem informasi yang tersedia dan juga dengan meningkatkan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan fungsi dari suatu organisasi perangkat daerah

2.1.2 Manajemen Aset

2.1.2.1 Aset

Dalam buku teori akuntansi, Suwardjono (2008:252) dijelaskan beberapa pengertian aset diantaranya menurut Financial Accounting Standards Board atau FASB (melalui Statements of Financial Accounting Concepts atau SFAC No. 6, prg. 25) “Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.” Menurut International Accounting Standards Committee (IASC) Aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh suatu badan sebagai hasil dari transaksi yang lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomis dimasa yang akan datang yang mengalir badan usaha.

Jika fokus kepada aset sektor publik tentu terdapat beberapa pengertian Seperti: Menurut Standar Penilaian Indonesia atau SPI, Aset dapat diartikan sebagai sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh suatu badan usaha atau pemerintah secara historis dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Jika dipandang dari aspek manajemen dan penilaian aset diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki secara sah dan mampu meningkatkan nilai dan pengembangan sumber daya. Dalam hal ini aset yang dimaksud lebih kepada aset tetap. Seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 bahwa Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Menurut Siregar (2004: 179) Aset Negara Adalah bagian dari kekayaan negara atau harta kekayaan negara (HKN) yang terdiri dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai oleh instansi Pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari perolehan yang sah, tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikelola BUMN) dan Kekayaan Pemerintah Daerah. Atau secara singkat dapat disebut sebagai “barang milik negara/kekayaan negara”

2.1.2.2 Manajemen

Pelaksanaan pada pemerintahan tentunya tidak terlepas dari fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, Penetapan, Pengarahan dan Pengontrolan. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata : “to manage” yang artinya mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin melalui peraturan yang diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu.

Manajemen adalah alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengertian manajemen itu sendiri adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2017). Manajemen menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah "penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran" atau pimpinan yang bertanggungjawab atas jalannya perusahaan dan organisasi.

2.1.2.3 Manajemen Aset

Manajemen aset merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam mengelola aset agar dapat memberikan manfaat secara optimal dengan cara yang efektif dan efisien. Menurut Siregar (2004) berpendapat Asset Management adalah “*good asset management in term of measuring the value of properties (asset) in monetary term and employing the minimum amount of expenditure on its management*” yang artinya Manajemen aset yang baik dalam hal mengukur nilai properti (aset) secara moneter dan menggunakan jumlah pengeluaran yang minimal untuk pengelolaannya. Sugiama (2013) berpendapat bahwa manajemen aset adalah suatu ilmu dan seni untuk melakukan kegiatan pengelolaan aset yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, legal audit, menilai, mengoprasikan, memelihara, membaharui atau menghapuskan hingga mengalikah aset secara efektif dan efisien.

Manajemen aset dibagi dalam lima tahap kerja, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, dan pengawasan dan pengendalian.

Kelima tahapan kerja ini saling berhubungan dan terintegrasi, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Inventarisasi Aset

Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/ jumlah, jenis, alamat dan lain lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lainlain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/ labelling, pengelompokan dan pembukuan/ administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

2. Legal Audit

Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain.

3. Penilaian Aset

Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

4. Optimalisasi Aset

Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah, legal, dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahap ini, aset-aset yang dimiliki pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggul yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah,

maupun jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan, hasil akhir dalam tahap ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.

5. Pengawasan dan Pengontrolan

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengalihan aset saat ini bisa dilakukan pengecekan melalui aplikasi SIMDA BMD.

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen aset dan cara kerja manajemen aset diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen aset merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam mengelola aset agar dapat memberikan manfaat secara optimal dengan cara yang efektif dan efisien agar aset yang dimiliki dapat memberikan nilai maksimal bagi pemiliknya.

2.1.3 Kualitas Aparatur Daerah

Sumber Daya Manusia pada pemerintah daerah atau yang biasa disebut Aparatur Daerah, merupakan unsur penting pergerakan dalam suatu organisasi.

Ishak (2002:5) menyatakan bahwa :

Sumber daya manusia adalah pemegang kunci dari semua aktivitas. Banyaknya modal yang berhasil dikumpulkan akan hilang tanpa makna jika sumber daya manusia sebagai pengelolanya tidak memiliki kompetensi dan kapasitas yang tepat untuk mengurus modal tersebut. Kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya juga ditentukan oleh kualitas aparatur daerah yang dimiliki oleh organisasi tersebut.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan aset, kemampuan intelektual dan kemampuan fisik sangat dibutuhkan oleh aparatur pemerintahan untuk mengamankan dan mengoptimalkan asetnya.

Menurut Suharto (2012) menyatakan :

Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan dari pegawai dalam menjalankan proses pengelolaan yang dilihat dari kemahiran seseorang, latar belakang pendidikan, persyaratan yang harus diikuti untuk dapat menjalankan proses pengelolaan, pelatihan-pelatihan, masalah profesional dan sosialisasi peraturan yang mengalami perubahan.

Aparatur daerah merupakan unsur terpenting dalam pergerakan suatu organisasi. Aparatur daerah yang memiliki kualitas mampu memberikan pengaruh

dalam mencapai visi misi dan keberhasilan kinerja yang baik bagi suatu organisasi.

2.1.4 Sistem Informasi

Sistem Informasi ikut berperan penting dalam proses Manajemen Aset pada Pengelolaan Barang Milik Daerah, karena dengan adanya sistem informasi tersebut. Manajemen Aset pada Pengelolaan barang milik daerah akan lebih terencana, terintegrasi, akuntabel dan transparan serta dapat memudahkan pekerjaan para pegawai.

Sistem Informasi menurut Hall dalam buku Kadir, 2016:11 adalah :
Sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai.

Lebih lanjut Kadir mengemukakan bahwa :

Sistem Informasi secara efektif, dilakukan melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

- 1) Hardware and software ,
- 2) Komunikasi,
- 3) Orang , dan
- 4) Basis Data.

Berdasarkan komponen fisik penyusunnya, sistem informasi terdiri atas komponen berikut menurut Sutanta (2011) :

1. Perangkat keras (Hardware)

Perangkat keras dalam sistem informasi meliputi perangkat-perangkat yang digunakan oleh sistem komputer untuk masukan dan keluaran (input/output device), memory, modem, pengolah (processor), dan periferal lainnya.

2. Perangkat lunak (Software)

Perangkat lunak dalam sistem informasi adalah berupa program-program komputer yang meliputi sistem operasi (Operating System/OS), bahasa pemrograman (programming language), dan program-program aplikasi (application).

3. Berkas basis data (File)

Berkas merupakan sekumpulan data dalam basis data yang disimpan dengan cara-cara tertentu sehingga dapat digunakan kembali dengan cepat dan mudah.

1. Prosedur (Procedure)

Prosedur meliputi prosedur pengoperasian untuk sistem informasi, manual, dan dokumen-dokumen yang memuat aturan-aturan yang berhubungan dengan sistem informasi dan lainnya.

2. Manusia (Brainware)

Manusia yang terlibat dalam suatu sistem informasi meliputi operator, programmer, system analyst, manajer sistem informasi, manajer pada tingkat operasional, manajer pada tingkat manajerial, manajer pada tingkat strategis, teknisi, administrator basis data (Database Administrator/DBA), serta individu lain yang terlibat di dalamnya.

Sistem informasi memegang peranan penting dalam proses pengelolaan aset Pemerintah Daerah, karena dengan adanya sistem informasi barang daerah pengelolaan aset akan lebih tertata, akuntabel dan transparan (Rizqi et al., 2013). Sistem informasi pendukung diperlukan untuk mencapai tujuan manajemen aset secara terencana, terintegrasi dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam jangka waktu yang singkat, dalam pengambilan keputusan.

Permendagri No. 19/2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menegaskan bahwa “Pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah agar mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA BMD) sebagai alat bantu pendataan Barang Milik Daerah”. Pengurus dan operator SIMDA BMD harus menguasai pengoperasian aplikasi SIMDA BMD dan memahami prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, sehingga pendataan barang tertata dan tersajikan dengan tepat dan akurat. Berdasarkan informasi umum yang terdapat pada www.bpkp.com, aplikasi SIMDA-BMD merupakan program aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.

Aplikasi SIMDA BMD mempunyai output antara lain :

1. Perencanaan : Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.
2. Pengadaan : Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dan Daftar Kontrak Pengadaan.

3. Penatausahaan : Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.
4. Penghapusan : Surat Keputusan (SK) Penghapusan, Lampiran Surat Keputusan (K) Penghapusan dan Daftar Barang yang Dihapuskan.
5. Akuntansi : Daftar Barang yang masuk Neraca(Intracomptable), Daftar Barang Extra Comptable, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap.

Tujuan dari aplikasi SIMDA BMD ini adalah agar semua aset dapat terjaga dan terdata dengan baik dalam upaya menyediakan informasi yang andal, akurat dan tepat waktu dan dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan seperti informasi posisi keuangan kementerian/lembaga (K/L) dan perencanaan (Isti'anah, 2011). Oleh karena itu, sistem informasi diduga berpengaruh terhadap manajemen aset.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diuraikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Iqlima Azhar, Darwanis & Syukriy Abdullah (2013)	Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, dan Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset (Studi pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh)	Independen: Kualitas Aparatur Daerah (X1) Regulasi (X2), dan Sistem Informasi (X3) Dependen: Manajemen Aset (Y)	Secara bersama kualitas aparatur daerah, regulasi, dan sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset. Secara parsial kualitas aparatur daerah tidak berpengaruh terhadap manajemen aset, sementara dua variabel bebas lain, regulasi dan sistem informasi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen aset.
2.	Rosihan,	Pengaruh Kualitas	Independen:	Kualitas aparatur daerah

	Bonifasia Elitha Bharranti, dan Westim Ratang (2016)	Aparatur Daerah, Regulasi, Sistem Informasi dan Komitmen Terhadap Manajemen Aset (Studi Pada Pemerintah Provinsi Papua)	Kualitas Aparatur Daerah (X1) Regulasi (X2) Sistem Informasi (X3), Komitmen Pimpinan (X4) Dependen: Manajemen Aset (Y)	berpengaruh signifikan dan berkorelasi positif serta berkontribusi terhadap Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Papua. Faktor regulasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset pada Pemerintah Provinsi Papua. Faktor sistim informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset pada Pemerintah Provinsi Papua. Faktor komitmen pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset Pemerintah Provinsi Papua
3.	Mita Arlini, Darwanis, dan Syukriy Abdullah (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Regulasi, dan Kompensasi Terhadap Manajemen Aset (Studi Pada Satuan Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Indonesia)	Independen: Kompetensi SDM (X1) Sistem Informasi (X2) Regulasi (X3), dan Kompensasi (X4) Dependen: Manajemen Aset (Y)	Seluruh variabel yang diuji dalam penelitian ini, yaitu: kompetensi SDM, sistem informasi, regulasi, dan kompensasi berpengaruh terhadap manajemen aset pada satuan kerja di lingkungan BKKBN se Indonesia baik secara simultan maupun parsial.
4.	Jefry Eka Prayogi, Iqlima Azhar, dan Muhammad	Pengaruh Pemahaman Regulasi, Sistem Informasi, Dan Kompetensi	Independen: Pemahaman Regulasi (X1) Sistem Informasi	Pemahaman regulasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap

	Rizqi Zati (2021)	Sumber Daya Manusia Terhadap Manajemen Aset Pada SKPS kota langsa	(X2), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) Dependen: Manajemen Aset (Y)	manajemen aset Sistem Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen aset
5.	Yusnidar, Muammar Khadafi, dan Damanhur (2020)	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Asset Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe	Independen: Kualitas Aparatur Daerah (X1) Regulasi (X2) Akuntabilitas (X3) Sistem Informasi Akuntansi (X4) Komitmen Organisasi (X5) Dependen: Manajemen Aset (Y)	kualitas aparatur daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset di Kota Lhokseumawe. regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset pada pemerintah Kota Lhokseumawe akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen aset pada pemerintah kota lhokseumawe sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset di Kota Lhokseumawe. komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset di Kota Lhokseumawe.
6.	Mainar, Darwanis, dan Syukriy Abdullah (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Regulasi, dan Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset (Studi pada SKPK di Kabupaten Aceh	Independen: Sistem Pengendalian Intern (X1) Pemahaman Regulasi (X2) Sistem Informasi	sistem pengendalian intern, pemahaman regulasi, dan sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset baik secara simultan dan parsial.

		Jaya)	(X3) Dependen: Manajemen Asset Aset (Y)	
7.	Tiara Prihatini, Noor Shodiq Askandar, dan Siti Aminah Anwar (2020)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Regulasi, Kompensasi, dan Asas – Asas Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Aset Pada Badan Usaha Milik Daerah (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang)	Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) Sistem Informasi (X2) Kompensasi Regulasi (X3) Asas- Asas Good Corporate Governance (X4) Dependen: Manajemen Asset Aset (Y)	Kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi, regulasi, kompensasi dan asas – asas good corporate governance setelah diuji secara simultan berpengaruh terhadap manajemen aset Perusahaan Daerah Air Minum kota Malang. Secara parsial atau terpisah variabel kompensasi tidak berpengaruh terhadap manajemen aset Perusahaan Daerah Air Minum kota Malang.
8.	Iqlima Azhar (2017)	Pengaruh Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh	Independen: Sistem Informasi (X1) Dependen: Manajemen Asset Aset (Y)	Sistem Informasi secara berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen aset pada SKPD di Pemko Banda Aceh

Sumber : Data yang diolah, 2022

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir di atas, akan tetapi yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel dan lokasi penelitiannya. Beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu tidak sama persis dengan variabel yang digunakan pada penelitian ini. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian sebelumnya juga berbeda dengan lokasi dalam penelitian ini.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Suriasumantri dalam Sugiyono (2017:60), “Kerangka Pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek

permasalahan”. Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011:60), mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan “Model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting”. Berdasarkan pengertian tersebut disimpulkan bahwa, Kerangka Berpikir adalah penjelasan sementara secara konseptual tentang keterkaitan hubungan pada setiap objek permasalahan dengan berdasarkan teori. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel bebas yaitu Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Informasi mempengaruhi variabel terikat yaitu, Manajemen Aset di Kabupaten Oku Selatan.

2.3.1 Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah terhadap Manajemen Aset

Manajemen Aset dalam pelaksanaannya memerlukan aparatur yang berkualitas dan mempunyai kuantitas yang memadai agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Suharto (2012:70) mengemukakan Kualitas Sumber Daya Manusia :

Kemampuan dari pegawai dalam menjalankan proses pengelolaan yang dilihat dari kemahiran seseorang, latar belakang pendidikan, persyaratan yang harus diikuti untuk dapat menjalankan proses pengelolaan, pelatihan-pelatihan, masalah professional dan sosialisasi peraturan yang mengalami perubahan.

Sumber daya manusia merupakan pilar utama dalam lingkungan organisasi yang akan memberikan pengaruh yang besar terhadap terwujud atau tidaknya tujuan dari organisasi tersebut. Kualitas sumber daya yang baik akan berdampak pada kinerja organisasi, salah satu indikator dari baiknya kinerja organisasi yaitu terletak pada Manajemen Asetnya. Menyadari hal tersebut dengan adanya aparatur yang berkualitas maka akan menghasilkan Manajemen Aset yang tertata dan lebih baik.

2.3.2 Pengaruh Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset

Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kemampuan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pemanfaatan dari teknologi sistem informasi tentu akan memudahkan pekerjaan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga akan terciptanya Manajemen Aset

yang efisien dan efektif dalam rangka mendukung Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan berkualitas.

2.3.3 Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset

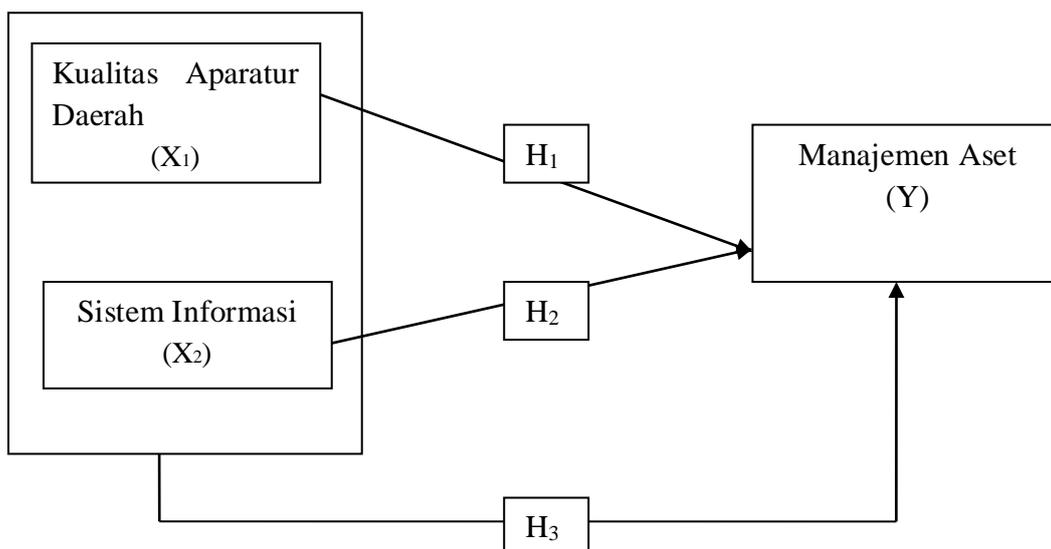
Pengelolaan Manajemen Aset pada Barang Milik Daerah yang berkualitas baik akan mencerminkan laporan keuangan yang baik. Hal ini menjadi penting dalam pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan serta opini laporan yang baik dari BPK. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19/2016 yang menyatakan bahwa, “Laporan Barang Milik Daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.

Menurut Waloejo (2012) menyatakan bahwa :

“Pengelolaan barang milik negara/daerah dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan 4 aspek pengelolaan barang milik daerah yang ideal yaitu :

- a. Aspek sistem,
- b. Aspek organisasi/ kelembagaan,
- c. Aspek sumber daya manusia dan
- d. Aspek sarana prasarana”.

Aspek pengelolaan barang milik daerah yang ideal yaitu aspek sistem, aspek organisasi.



Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan penelitian terdahulu , menurut Rosihan, Bonifasia Elitha Bharranti, dan Westim Ratang (2016), dinyatakan bahwa Kualitas aparatur daerah, dan sistem informasi berpengaruh signifikan dan berkorelasi positif serta berkontribusi terhadap Manajemen Asset Pemerintah Provinsi Papua.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Diduga terdapat pengaruh Kualitas Aparatur Daerah terhadap Manajemen Aset secara parsial.
- H2 : Diduga terdapat pengaruh Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset secara parsial.
- H3 : Diduga terdapat pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset secara Simultan.